

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini banyak mengalami perkembangan, diantaranya terdapat di perusahaan swasta maupun pemerintahan yang semakin berkembang, sehingga permasalahan yang dihadapi juga semakin kompleks. Melihat adanya kemajuan perekonomian di era ini selain membawa manfaat bagi masyarakat, juga bisa menjadi sumber masalah. Salah satu permasalahannya ialah kecurangan atau *fraud*. *Fraud* adalah suatu tindakan penipuan yang disengaja, pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan atau mengubah suatu asset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri atau kelompok yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pihak lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh aturan dan hukum yang berlaku.

Banyak kasus *fraud* yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan terutama birokrasinya yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di instansi pemerintahan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Hal ini kemudian mengakibatkan beberapa pelaku *fraud* banyak melakukan tindakan kecurangan.

Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di instansi pemerintahan yaitu korupsi. Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Dari sudut pandang hukum yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 Jo No. 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Peringkat pertama korupsi ini terjadi dikalangan Birokrasi, DPRD, dan Kepala Daerah

IAI mengatakan Kasus korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga melibatkan orang-orang yang dibawahnya, seperti memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark up yang dapat merugikan keuangan negara dan hal ini biasanya dipicu oleh adanya keinginan untuk menampilkan atau menyajikan laporan keuangan yang surplus.

Salah satu contoh kasus Kecurangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) terkait dugaan korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengadaan barang serta jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo. selain Karna, KPK juga menahan Eko Prionggo Jati (EJP), seorang pegawai negeri sipil di Dinas PUPR Kabupaten Situbondo. Kedua tersangka ditahan mulai Selasa (21/1/2025) hingga 9 Februari 2025 di Rutan KPK cabang Jakarta Timur. "Penyidik melakukan penahanan," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Penahanan ini dilakukan setelah kedua tersangka sebelumnya absen dari panggilan KPK pada Kamis (16/1/2025). Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini bermula dari dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang serta jasa di Pemkab Situbondo periode 2021-2024. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan penyidikan telah dimulai

sejak 6 Agustus 2024 “KPK telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan atas dugaan korupsi ini,” ujarnya. KPK menegaskan akan terus mengusut tuntas kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Penahanan kedua tersangka dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan. keuangan illegal.

Korupsi juga bukan hanya didefinisikan dengan pegawai yang mencuri uang daerah atau uang negara tetapi termasuk perbuatan-perbuatan koruptif. Seperti sering nitip absen, pulang lebih cepat, dikantor tidak ada kegiatan, tidak kerja, tidur serta bermain game saat jam kantor. “Kita mendorong daerah-daerah untuk menciptakan standar minimal pelayanan atau standar kinerja untuk setiap pegawai. Pegawai yang berkinerja baik layak dihargai lebih dibandingkan pegawai yang tidak berkinerja. Pemerintah membayar gaji pegawai karena kinerjanya bukan karena absensinya,” kata Alexander Marwata saat menjadi narasumber talkshow di Operation Room Graha Adiguna, Selasa, 23 Oktober 2018

Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengetahui kecenderungan terjadinya fraud di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Terjadinya ketiga faktor di atas disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dilihat melalui Teori *Fraud Triangle* yang pertama kali dikembangkan oleh Cressey mengatakan bahwa “fraud disebabkan oleh tiga hal, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).” *Pressure* adalah tekanan situasional yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Dalam beberapa penelitian, ada beberapa hal yang terkait dengan tekanan (*pressure*) yaitu : ketidakpuasan kompensasi, gaya kepemimpinan, penghasilan kurang, kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu tekanan (*pressure*) dengan adanya kepuasan kompensasi yang didukung dengan teori Greenberg tentang keadilan interaksional.

Menurut Wexley dan Yuki, adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja. Bagi seorang pegawai, kompensasi merupakan suatu outcome atau reward yang penting. Sehingga dapat diasumsikan, semakin rendah kepuasan kompensasi yang diterima, maka semakin tinggi tingkat korupsi.

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Di antara tiga elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, kontrol dan upaya deteksi dini. Beberapa penelitian yang terkait dengan *opportunity* (kesempatan) diantaranya yaitu : kepatuhan terhadap pengendalian internal yang rendah dan asimetri informasi. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu *opportunity* (kesempatan) dengan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal birokrasi pemerintah akan memberikan pengaruh terjadinya kecurangan akuntansi pemerintahan. Semakin baik pengendalian internal birokrasi pemerintahan, maka semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah.

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku

yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Beberapa penelitian yang terkait dengan rasionalisasi (pembenaran) yaitu : kultur organisasi, dan perilaku tidak etis. Pada penelitian kali ini peneliti memproksikan suatu rasionalisasi dengan perilaku tidak etis. Dallas menyatakan bahwa berbagai kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xeros, dan lain-lain di USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Demikian pula. CIMA berpendapat bahwa perusahaan dengan standar etika yang rendah memiliki risiko kecurangan akuntansi yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai yang bekerja di BPKAD untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Pada Kantor bupati Situbondo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan ?
2. Apakah pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan ?
3. Apakah pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan ?
4. Apakah perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap *Fraud* di Sektor Pemerintahan.
4. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan para mahasiswa yang akan berkarir dalam bidang akuntansi lebih sadar terhadap berbagai skandal yang terjadi di bidang akuntansi sehingga dapat menghindari terjadinya krisis etis profesional.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Objek Penelitian.

Bagi Objek penelitian yaitu instansi pemerintahan berguna sebagai masukan dalam upaya mencegah terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, dengan menekan penyebab terjadinya fraud di sektor pemerintahan seperti yang disajikan penulis.

b. Bagi Pembaca.

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait.

